

ANALISIS KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES MENURUT SISTEM MERIT

INTISARI

Syarafina Dyah Amalia¹, Oce Madril²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Brebes menurut sistem merit dan juga sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Brebes.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan menganalisis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Brebes, sedangkan untuk data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, bahwa pelaksanaan seleksi terbuka JPT di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Brebes secara garis besar telah sesuai dengan prinsip sistem merit yang di dalamnya terdapat prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas serta adanya pihak penilai independen dalam rangka objektivitas pelaksanaan, meskipun tidak dapat dikatakan sempurna sehingga masih dibutuhkan beberapa perbaikan karena belum semua jabatan lowong dapat terisi dengan adanya seleksi terbuka. Kedua, rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan seleksi terbuka dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seleksi terbuka, adapun rekomendasi yang dilakukan meliputi: perbaikan terhadap sistem penilaian pada setiap tahapan, penegasan penetapan standar rekomendasi pejabat yang berwenang terhadap penetapan pejabat terpilih, yang terakhir adalah peningkatan pengawasan oleh KASN dan Inspektorat pada setiap pelaksanaan seleksi terbuka.

Kata kunci: seleksi terbuka, jabatan pimpinan tinggi, sistem merit.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Analysis of Open Selection Policy for High Leadership Officers (JPT) in the Regional Government of Brebes Regency According to the Merit System

Abstract

Syarafina Dyah Amalia¹, Oce Madril²

This study aims to find out and analyze how the implementation of the open selection policy for High Leadership Officers (JPT) in the Brebes district government environment according to the merit system and also at the same time provide recommendations for improvements to the open selection of High Leadership Officers (JPT) within the district government Brebes.

This research uses a normative-empirical method, by analyzing primary and secondary data. Primary data were obtained based on interviews with respondents relating to the implementation of the open selection of High Leadership Offices within the local government of Brebes Regency, while secondary data included primary, secondary and tertiary legal materials. This research was conducted using a legal approach and an empirical approach.

Based on the results of the study, found 2 (two) conclusions. First, that the implementation of JPT's open selection within the Brebes Regency local government in broad outline is in accordance with the principles of the merit system in which there are principles of openness, fairness, accountability and the existence of an independent appraiser in the framework of objectivity of the implementation, although it cannot be said to be perfect so that it is still needed some improvements because not all vacant positions can be filled with open selection. Second, recommendations for improvements to the implementation of open selection are needed to improve the effectiveness of the implementation of open selection, while the recommendations made include: improvement of the assessment system at each stage, confirmation of standard setting recommendations for authorized officials to determine elected officials, the last is increased supervision by KASN and Inspectorate in every open selection

Keywords: open selection, high leadership officers, merit system.

¹ Student at Magister Ilmu Hukum, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada